

Nama : Dhona Dwiyantri

NPM : 2213031004

Indonesia memiliki posisi yang unik dalam *Global Value Chains* (GVCs) karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Selama ini, Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri global. Posisi ini memberikan sejumlah keuntungan, namun juga menyimpan keterbatasan struktural yang menghambat penciptaan nilai tambah nasional.

Dalam konteks GVC saat ini, kelebihan utama posisi Indonesia adalah ketersediaan bahan baku yang stabil dan biaya produksi yang relatif rendah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai mitra penting dalam rantai pasok global, terutama untuk komoditas strategis seperti nikel yang dibutuhkan dalam industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, peran sebagai pemasok bahan mentah relatif minim risiko teknologi dan tidak membutuhkan investasi besar dalam riset dan pengembangan. Namun, kekurangannya sangat signifikan, yaitu rendahnya nilai tambah yang dinikmati Indonesia. Keuntungan terbesar justru diperoleh oleh negara atau perusahaan yang menguasai proses hilir seperti pemurnian lanjutan, manufaktur, desain produk, dan pemasaran global. Akibatnya, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan pendapatan nasional menjadi terbatas, serta membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Indonesia belum berhasil memperoleh nilai tambah yang optimal dalam GVC karena beberapa faktor struktural. Pertama, keterbatasan kapasitas industri pengolahan dan manufaktur berteknologi tinggi menyebabkan Indonesia sulit naik ke tahapan GVC yang lebih bernilai. Kedua, lemahnya penguasaan teknologi, riset, dan inovasi membuat proses produksi lanjutan masih bergantung pada investasi dan teknologi asing. Ketiga, infrastruktur industri, regulasi, dan kualitas SDM yang belum merata turut menghambat pengembangan industri hilir secara

luas. Selain itu, selama bertahun-tahun kebijakan pembangunan cenderung berbasis ekspor komoditas mentah karena dianggap cepat menghasilkan devisa, meskipun kurang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Terkait evaluasi kebijakan, kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor nikel secara ekonomi berpotensi meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC. Kebijakan ini memaksa proses pengolahan dilakukan di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta transfer teknologi. Dalam jangka panjang, hilirisasi dapat mendorong Indonesia naik dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi produsen bahan setengah jadi atau bahkan produk akhir, seperti komponen baterai kendaraan listrik. Dari sisi geopolitik, kebijakan ini juga memperkuat posisi tawar Indonesia karena nikel merupakan komoditas strategis dalam transisi energi global. Namun, kebijakan ini juga mengandung risiko, seperti ketergantungan berlebihan pada investor asing tertentu serta potensi distorsi pasar jika tidak diiringi peningkatan kapasitas nasional.

Dampak kebijakan hilirisasi terhadap hubungan dengan negara mitra dagang cukup kompleks. Di satu sisi, negara mitra yang bergantung pada pasokan bahan mentah dari Indonesia merasa dirugikan dan menilai kebijakan tersebut bersifat proteksionis, sebagaimana tercermin dari gugatan Uni Eropa ke WTO. Hal ini berpotensi memicu ketegangan dagang dan menurunkan kepercayaan dalam kerja sama perdagangan internasional. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga membuka peluang kerja sama baru dalam bentuk investasi langsung asing (FDI), alih teknologi, dan pengembangan industri bersama, selama Indonesia mampu memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

Jika berperan sebagai penasihat ekonomi pemerintah, strategi yang perlu diusulkan adalah pendekatan hilirisasi yang lebih cerdas dan diplomatis. Pertama, Indonesia perlu mengombinasikan kebijakan hilirisasi dengan penguatan industri domestik, terutama dalam penguasaan teknologi, riset, dan peningkatan kualitas SDM, agar tidak hanya menjadi lokasi pemrosesan milik asing. Kedua, kebijakan larangan ekspor sebaiknya bersifat bertahap dan fleksibel, disertai peta jalan industri yang jelas sehingga mitra dagang memahami arah kebijakan Indonesia.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat diplomasi ekonomi dengan menawarkan skema kerja sama strategis, seperti *joint venture*, *co-production*, dan integrasi regional dalam GVC, bukan sekadar pembatasan perdagangan. Keempat, Indonesia perlu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional dengan memanfaatkan ruang kebijakan yang diizinkan WTO, seperti pengembangan industri berbasis pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional, serta memperkuat posisi sebagai pemain penting dalam ekonomi global.